

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era persaingan global ini, *trend* pendidikan mengalami pergeseran orientasi yang menempatkan pembangunan manusia seutuhnya melalui pendidikan dan latihan dengan beragam jenis, jenjang, sifat dan bentuknya. Pendidikan manusia Indonesia seutuhnya diidealisasikan menjadi titik puncak tercapainya pendidikan nasional yang sampai saat ini menjadi dambaan bangsa Indonesia melalui berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pada jalur formal, nonformal maupun informal. Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan, merupakan suatu upaya untuk menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang dengan jalan memperkenalkan pembaharuan-pembaharuan yang cenderung mengejar efisiensi dan efektifitas (Sa'ud, 2008: 1).

Upaya menghasilkan individu yang unggul terus diolah dalam menemukan formula yang tepat sehingga lembaga pendidikan dijadikan instrumen utama proses kemanusiaan dan pemanusiaan, yaitu menghargai dan memberi kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, dimana keunggulan individu tidak lagi menjadi tolak ukur keberhasilan output suatu lulusan namun keunggulan partisipatoris menjadi dasar yang lebih kokoh dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul (Tilaar, 2003, 63).

Namun lembaga pendidikan juga seringkali dianggap memiliki andil yang besar dalam permasalahan kualitas pencari kerja ini. Megawangi (2007) menjelaskan strategi pendidikan di Indonesia mempersiapkan peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi yang sebetulnya lebih tepat bagi individu yang mempunyai potensi akademik tinggi. Tantangannya adalah apakah penduduk mayoritas sudah dipersiapkan untuk dapat bekerja secara profesional sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi.

Merujuk pada pernyataan tersebut di atas berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2007 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka pengangguran terbuka berkurang menjadi 9,75 persen dibandingkan dengan periode Agustus 2006 yang besarnya 10,28 persen. Meskipun menurun, jumlah penganggur dari kalangan perguruan tinggi justru meningkat. Jika pada Agustus 2006 penganggur dari kalangan terdidik ini sebanyak 673.628 orang atau 6,16 persen, setengah tahun kemudian jumlah ini naik menjadi 740.206 atau 7,02 persen. Sedangkan berdasarkan data BPS Agustus 2009 jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 8,96 juta orang (7,87%) dari total angkatan kerja sebanyak 113,83 juta orang (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010).

Fakta dan realitas di atas menurut Soedijarto (1997) menjadi landasan empiris dibutuhkannya pendidikan yang mampu membekali lulusan pendidikan umum dengan kemampuan khusus yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang. Dalam kaitannya dengan kebutuhan ini peranan kursus kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat sangatlah penting dan

strategis. Layanan pendidikan seperti ini disamping dibutuhkan bagi mereka yang baru menyelesaikan pendidikan umum juga diperlukan bagi mereka yang telah berada di dunia kerja tetapi perlu terus meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan teknologi dan informasi dimana mereka bekerja.

Layanan pendidikan kursus kejuruan ini diwadahi oleh pemerintah sebagai pendidikan non formal, sebagaimana telah di atur pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa “jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Artinya ketiga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan layanan pendidikan kepada masyarakat. Khusus berkaitan dengan jalur pendidikan nonformal ditegaskan pada pasal 26 ayat (1) bahwa “pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat. Untuk itu pendidikan nonformal harus mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mendapat pendidikan melalui jalur formal.

Satuan pendidikan non formal dalam upaya meningkatkan akses pendidikan tersebut dilaksanakan melalui kursus, pelatihan, PKBM, kelompok belajar dan satuan pendidikan sejenis yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Poin 4 bahwa “Satuan

pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”.

Pendidikan non formal informal, terbagi dalam berbagai bentuk entitas-entitas pendidikan dengan beragam pola, sasaran dan tujuan pendidikan, yang salah satu diantaranya adalah kursus. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 5 disebutkan bahwa “kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”. Untuk itu kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional.

Tumbuh dan berkembangnya kursus di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari tuntutan kebutuhan masyarakat dan/atau dunia kerja, hingga saat ini telah tercatat sebanyak 11.953 lembaga kursus yang telah memiliki nomer induk (Nilek) per 6 Januari 2010 (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010), sehingga dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan kursus berbasis pada *demand driven* atau *market driven*. Masyarakat dan pasarlah yang akan menentukan kapan suatu jenis kursus akan tumbuh dan berkembang dan kapan suatu jenis kursus tidak diminati lagi atau dibutuhkan oleh masyarakat atau dunia kerja.

Jumlah kursus dan jenis kursus yang begitu besar merupakan aset yang sangat penting dan strategis bagi Pemerintah dalam pemeratakan dan memperluas akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sehingga mereka mampu mengisi pasar kerja lokal, nasional, dan internasional. Dari jumlah tersebut yang paling banyak diselenggarakan dan diminati oleh masyarakat adalah jenis-jenis kursus sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1  
Jumlah Jenis Kursus Berdasarkan Yang Terbanyak Diselenggarakan dan Diminati oleh Masyarakat

No.	Jenis Pendidikan/Kursus	Tahun/Jumlah		
		2003	2004	2005
1.	Komputer	1.547	2.595	2.869
2.	Akuntansi	282	406	352
3.	Sekretaris	73	87	109
4.	Tata Kecantikan Kulit	140	299	234
5.	Bahasa Inggris	1.720	2.443	2.613
6.	Bahasa Mandarin	109	200	193
7.	Bahasa Jepang	98	114	137
8.	Menjahit Pakaian	882	772	1.031
9.	Tata Kecantikan Rambut	316	545	508
10.	Tata Rias Pengantin	203	292	334
	JUMLAH	5.370	7.753	8.380

Sumber: Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (2010)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kursus pada tiga tahun berturut-turut mengalami perkembangan pasang surut. Namun secara stimulan 3 jenis kursus yaitu komputer, Bahasa Inggris dan menjahit tetap menjadi pilihan utama selama tiga tahun berturut-turut.

Terus berkembangnya kursus dalam berbagai jenis keterampilan yang ditawarkan ini diperkuat dengan adanya UU No. 17 tentang RPJPN 2005 - 2009

yang menyatakan bahwa penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar. Kursus sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional.

Selanjutnya ditegaskan lagi dalam PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. Sehubungan dengan hal-hal di atas, pengembangan kurikulum kursus akan terus dilakukan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Sebagai contoh untuk standar kompetensi yang dikembangkan pada program kursus menjahit harus mengacu kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi Menjahit Pakaian/Tata Busana yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip dasar dalam tata busana dan mengaplikasikannya secara praktis untuk para konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan industri busana .

Namun dibalik potensi pengembangan pendidikan kecakapan hidup pada program kursus, masih dijumpai adanya kendala dalam pengembangan

lulusannya, khususnya menyangkut kemampuan yang sesuai dengan standar dunia usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar (2003) yaitu: *pertama*, tidak optimalnya penyerapan lulusan kursus pada lapangan kerja yang ada yang mana masih ada lulusan kursus yang belum bekerja karena ketatnya persaingan di dunia industri. *Kedua*, kualifikasi lulusan kursus masih belum memenuhi standar industri, hal ini teridentifikasi pada saat peserta kursus mengikuti magang pada perusahaan-perusahaan mitra. *Ketiga*, belum terciptanya kemitraan antara lembaga kursus dan industri untuk menjembatani “gap” yang ada. Kemitraan yang terjalin pada saat ini belum mencapai suatu kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dimana pihak industri masih merasa terbebani dengan adanya kegiatan magang dari peserta kursus sehingga tidak semua peserta kursus dapat mengikuti magang di perusahaan. *Keempat*, dibutuhkan biaya yang besar untuk memenuhi kompetensi yang ada. Kesadaran dan keinginan dari lembaga kursus untuk meningkatkan profesionalitas lembaganya masih tersandung oleh kendala dalam pembiayaan yang cukup besar.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas memiliki dampak pada terjadi penurunan jumlah kursus yang cukup berarti dari tahun 2005 ke 2006 yang disebabkan karena kurangnya peminat pada lembaga-lembaga kursus tertentu yang berpengaruh pada keberlanjutan dari lembaga kursus tersebut (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010). Namun walaupun kelembagaan kursus mengalami penurunan jumlah yang signifikan, Pemerintah tetap memandang kursus dan pelatihan sebagai program yang strategis dalam upaya penanggulangan pengangguran melalui program pendidikan luar sekolah yang

dapat dilakukan melalui program pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi kecakapan hidup (*life skill*) kepada kelompok masyarakat pengangguran agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu.

Hal tersebut ditunjukkan dengan disediakannya berbagai subsidi program kursus, seperti Kursus Kewirausahaan Kota (KWK), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), PKH Kerjasama SMK/Politeknik/BLK/Perguruan Tinggi, Kursus Para Profesi (KPP), Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Kewirausahaan Pemuda Melalui Lembaga Kepemudaan, dan Kewirausahaan Bagian SP-3 (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2009).

Namun dalam pelaksanaannya pembelajaran program kursus bersubsidi masih mempergunakan pola pembelajaran dengan kurikulum, metode, dan strategi pembelajaran yang belum berorientasi pada penguasaan kompetensi peserta kursus sesuai dengan alokasi waktu subsidi program, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan para instruktur serta pengelola dalam mengelola program pelatihan menjahit bersubsidi.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pembelajaran kursus dapat diidentifikasi sebagai berikut yaitu:

1. Dibutuhkannya kurikulum yang menghasilkan kualifikasi profesional baru yang memperkenalkan budaya kerja seperti *team work*, kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri, berkomunikasi dalam



kelompok, kesadaran akan mutu sebagai kriteria, kerjasama dalam kelompok secara multifungsi dan sebagainya.

2. Lulusan kursus perlu memiliki kompetensi keterampilan yang membekali mereka untuk dapat bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya.
3. Pembelajaran kursus perlu diarahkan pada pengembangan kemandirian belajar peserta kursus untuk dapat membentuk kesinambungan hidup peserta nantinya. Peserta kursus menjadi manusia pembelajar.
4. Kurikulum yang dikembangkan pada program *short course*/pelatihan yang merupakan program subsidi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran reguler pada kursus.
5. Pendidikan diarahkan kepada pembelajaran kelompok yang menghasilkan individu yang mampu melakukan kerjasama dan penghargaan terhadap sesama manusia serta siap untuk berkompetisi dalam era globalisasi yang memiliki ciri kebebasan, keterbukaan dan integrasi global.

Penelitian ini merancang model pembelajaran dalam program kursus mandiri yang ditunjukkan oleh peningkatan kompetensi peserta kursus dan kemandirian peserta kursus. Secara lebih spesifik model yang dirancang ini dikhususkan pada program pelatihan keterampilan menjahit yang diselenggarakan oleh lembaga kursus untuk warga masyarakat dengan berbagai prasyarat yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang terampil sehingga dapat berdaya nantinya. Sehubungan dengan itu dalam penelitian ini dipertanyakan:

Bagaimanakah model pembelajaran mandiri dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian peserta kursus?

### **C. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Pelaksanaan program pelatihan keterampilan pada lembaga-lembaga kursus yang menjadi mitra Kementerian Pendidikan Nasional telah menjadi salah pendorong tercapainya upaya penanggulangan pengangguran pada wilayah pedesaan maupun perkotaan. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (2010) jumlah sasaran yang dijangkau sejak tahun 2002 sampai dengan 2006 sebanyak 294.548 orang melalui 9.448 lembaga kursus. Di Jawa Barat sendiri pada tahun 2009 terdapat 1.792 lembaga kursus yang telah memiliki Nilek, kursus-kursus tersebut menyelenggarakan berbagai jenis keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Lembaga kursus yang dapat mengajukan subsidi program ialah lembaga kursus yang telah memiliki Nilek. Nilek menjadi prasarat utama bagi lembaga kursus yang ingin mengajukan bantuan subsidi program pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Pelita Massa sebagai salah satu LKP di Jawa Barat yang telah memiliki Nilek dan menjadi salah satu mitra Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja di Jawa Barat menyelenggarakan program pelatihan keterampilan menjahit dan otomotif bersubsidi. Hingga saat ini Pelita Massa telah meluluskan kurang lebih 10 angkatan pelatihan keterampilan. Pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan

pada program pelatihan tersebut dirancang sesuai dengan anggaran dan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan.

Dari berbagai jenis pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus Pelita Massa, setiap pelatihan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis program yang disubsidikan, prasyarat peserta kursus, jenis keterampilan yang harus diajarkan, waktu pelaksanaan, dan anggaran yang disediakan oleh lembaga mitra. Berdasarkan hasil kajian di lapangan diketahui bahwa rancangan kurikulum/program pada jenis pelatihan keterampilan yang memiliki jangka waktu yang tertentu dengan anggaran biaya yang berbeda memiliki kesulitan tersendiri dalam penyusunan program pembelajaran. Pihak pengelola kursus dan instruktur diharuskan merancang program pembelajaran yang berbeda dengan yang biasa mereka laksanakan pada pembelajaran kursus regular.

Sehingga diperlukan langkah-langkah dan pengembangan yang lebih baik guna mencapai hasil yang maksimal dalam hal isi dan atau materi program, pengelolaan pembelajaran, strategi pembelajaran, instruktur pembelajaran, dan karakteristik peserta kursus. Dengan demikian perumusan masalah penelitian ini secara umum adalah: Bagaimana model pembelajaran mandiri dapat meningkatkan kompetensi peserta kursus. Berdasarkan pada masalah umum penelitian, maka secara khusus masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah kondisi empiris penyelenggaraan kursus menjahit di Jawa Barat?
2. Bagaimanakah model konseptual pembelajaran keterampilan melalui

pembelajaran mandiri dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian peserta kursus?

3. Bagaimana implementasi model pembelajaran mandiri dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian peserta kursus?
4. Bagaimana efektivitas model pembelajaran mandiri dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian peserta kursus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran mandiri yang dilaksanakan pada program kursus dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dari peserta didik. Mengacu pada tujuan umum, maka tujuan studi ini secara terperinci adalah:

1. Memperoleh informasi deskripsi tentang penyelenggaraan kursus menjahit di Jawa Barat.
2. Mengembangkan rancangan model konseptual pembelajaran keterampilan melalui model pembelajaran mandiri dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian peserta kursus.
3. Mendeskripsikan hasil implementasi model konseptual pembelajaran melalui model pembelajaran mandiri dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian peserta kursus.
4. Memperoleh gambaran mengenai efektivitas model pembelajaran mandiri dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian peserta kursus.

Dari keempat tujuan yang ditetapkan, pada akhirnya dapat menemukan sebuah model pembelajaran kursus yang dapat meningkatkan kompetensi peserta kursus yang difokuskan pada pembelajaran mandiri sebagai model pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah. Sehingga model yang dikembangkan dapat diimplementasikan pada proses pembelajaran kursus sebagai salah satu program dalam pendidikan luar sekolah.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat prosentase, yang bersifat menyeluruh atau model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa bagian atau sifat dari kehidupan sebenarnya (Simarmata, 1983: ix-x). Dengan kata lain model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu hal yang akan dihasilkan. Dalam uraian selanjutnya istilah “model” digunakan untuk menunjukkan pengertian yang pertama yaitu sebagai kerangka konseptual.
2. Pengelolaan pembelajaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian sistem interaksi aktivitas belajar peserta didik dan pendidik yang melakukan tugas pengajaran dalam mencapai tujuan belajar peserta didik. Dalam program kursus yang dimaksud dengan peserta didik adalah peserta kursus dan pendidik adalah instruktur.

3. Pendidikan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Lalu, ada pula "pembelajaran" yang berarti proses, cara, perbuatan mempelajari.
4. Kursus adalah satuan pendidikan dalam pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (5)).
5. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu (Keputusan Mendiknas No. 45 Tahun 2002 dalam Munthe, 2009: 27). Kompetensi juga didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah indikatornya yang dapat diukur dan diamati, kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara kontekstual (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010)
6. Kemandirian dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana individu yang memiliki inisiatif dalam merancang pembelajaran, melaksanakannya dan mengevaluasi pengalaman pembelajarannya (Merriam, 2006: 110).

Adapun pengertian kemandirian dalam penelitian ini merupakan kemandirian peserta pelatihan keterampilan yang merupakan output dari pembelajaran keterampilan yang diikutinya. Dimana setelah menyelesaikan pelatihan keterampilan peserta kursus akan mampu memahami potensi dirinya untuk mendorong menuju keberdayaan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan keilmuan pendidikan luar sekolah khususnya dalam:

- a. Pengelolaan kursus sebagai satuan dalam pendidikan luar sekolah
- b. Pengelolaan pembelajaran keterampilan dalam satuan pendidikan luar sekolah.
- c. Pembelajaran mandiri yang dikembangkan dalam program pendidikan luar sekolah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan dan alternatif bagi pengembangan program kursus bersubsidi.
- b. Bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kursus dan pelatihan (Direktorat Kursus dan Pelatihan,

P2PNFI, BPKB, SKB, Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota, LSM, PKBM) sebagai masukan dan alternatif dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan program kursus.

- c. Pengelola dan penyelenggara program kursus dalam memberikan gambaran akan suatu model pembelajaran mandiri pada kursus menjahit. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam penyusunan program kursus menjahit sehingga dapat menghasilkan tenaga lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

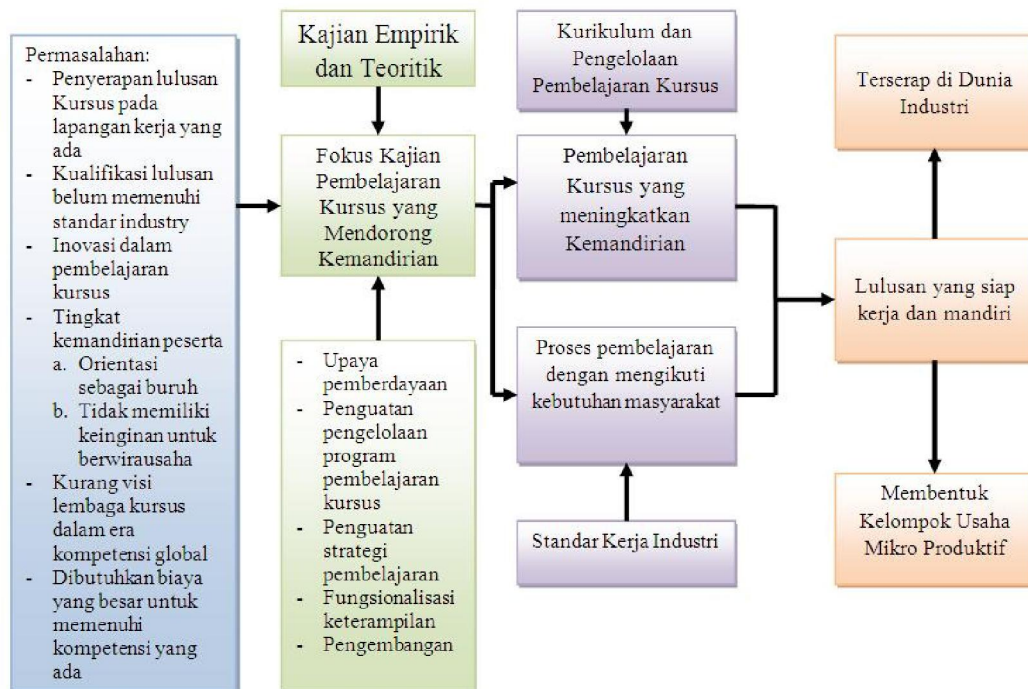
#### **G. Kerangka Berpikir**

Rumusan masalah yang dikemukakan, merupakan fokus penelitian yang diupayakan untuk menemukan solusinya melalui pengembangan model pembelajaran mandiri pada program kursus. Mengacu pada fokus penelitian ini adalah “bagaimana model pembelajaran kursus melalui pembelajaran mandiri dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian peserta kursus, maka alur pemikiran dalam penelitian ini, digambarkan berdasarkan permasalahan-permasalahan faktual serta konsep-konsep teoritis yang ada dan dikembangkan menjadi satu proses pembelajaran yang berdasar pada alur pembelajaran mandiri sebagai suatu sistem, konsep dan operasional pembelajaran orang dewasa dan proses pemandirian sebagai suatu dampak dari pembelajaran kursus. Kerangka pemikiran yang diperkirakan dapat dijadikan acuan penelitian digambarkan sebagai berikut:



1. Pengelolaan pembelajaran kursus menggunakan konsep-konsep pembelajaran mandiri sebagai bentuk pembelajaran partisipatif yang dapat menggiatkan semua peserta didik, strategi-strategi pembelajarannya ideal untuk kelas yang heterogen di mana peserta didik dapat bekerja kolaboratif untuk menyelesaikan masalah.
2. Pembelajaran mandiri merupakan suatu sistem pembelajaran yang berpengaruh pada (a) penguasaan kompetensi belajar peserta kursus (b) peningkatan kemandirian (d) peningkatan akses lulusan terhadap dunia usaha, (e) dampak terhadap kehidupan peserta kursus.
3. Kegiatan pembelajaran dikaji dengan konsep andragogi, yang mencakup konsep diri, pengalaman belajar, pengalaman berusaha, kesiapan belajar, orientasi belajar dan minat serta motivasi (Abdulhak, 1995)
4. Hasil dari pembelajaran kursus dengan pembelajaran mandiri adalah meningkatkan kemandirian dari peserta kursus yang ditandai oleh (a) munculnya rasa tanggung jawab, (b) memiliki etos kerja yang tinggi dan (c) disiplin dan berani mengambil resiko.

Secara skematis, kerangka pikir penelitian ini divisualisasikan pada bagan1.1



Bagan 1.1  
Kerangka Berpikir

## H. Penelitian yang Relevan

### 1. Model Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewiraswastaan bagi Wanita pada Lembaga Kursus (Anizar Ahmad / 979931)

Model ini dikembangkan berdasarkan siklus pengembangan kurikulum pendidikan luar sekolah pada umumnya yaitu (1) mengembangkan ide-ide dan konsep tentang kurikulum yang ingin diselenggarakan, (2) mengidentifikasi khalayak sasaran sehubungan dengan karakteristik dan latar sosialnya, (3) melakukan pengukuran kebutuhan atau masalah belajar, (4) merumuskan tujuan-tujuan belajar, (5) menyusun perencanaan atau design operasional kurikulum, (6) mengembangkan kurikulum dan memilih metode belajar serta material belajar, (7) melaksanakan pembelajaran dan (8) menyelenggarakan evaluasi

Dari studi kasus didapatkan data bahwa terdapat kecenderungan lembaga kursus mengalokasikan pendidikan kewiraswastaan pada kurikulum pengajaran namun belum memadai dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kurikulum belajar secara keseluruhan. Strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan belum dilakukan secara memadai sebagaimana harapan para peserta kursus dan direkomendasikan para ahli pendidikan dan praktisi kewiraswastaan. Dari studi pengembangan dapat direkonstruksikan deskripsi model normatif kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada lembaga kursus.

Pada akhir penelitian diperoleh temuan sebagai berikut: 1) pada program kursus yang diikuti wanita perlu pengalokasian pendidikan kewiraswastaan dan strategi pembelajaran yang diatur secara efektif, 2) calon peserta kursus wanita perlu memikirkan penggunaan kemampuan vokasional yang akan dipelajari dalam mengembangkan kemampuan mental dan motivasi serta kemampuan manajerial sebagai pekerja mandiri dan menempatkannya sebagai kebutuhan, 3) para penyelenggara kursus perlu memiliki sikap bahwa pendidikan kewiraswastaan merupakan komponen kurikulum pelengkap yang perlu dialokasikan dalam kurikulum kursus, 4) pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan harus ditekankan pada tatanan sikap mental dan kemampuan praktisi kewiraswastaan bukan pada teori dan 5) pola pembelajaran pendidikan kewiraswastaan seharusnya diselenggarakan dengan pendekatan kelompok kecil pembelajaran partisipatif berorientasi lapangan dan berkelanjutan.

2. Model Pembelajaran Magang bagi Peningkatan Kemandirian Warga Belajar (Studi pada Sentra Industri Kecil Rajutan dan Bordir di Daerah Priangan Timur) Oleh Mustofa Kamil.

Penelitian ini berangkat dari masalah belum berfungsinya program magang sebagai satuan pendidikan luar sekolah dalam meningkatkan kemandirian warga belajar (pemegang). Untuk itu diteliti bagaimana model program pembelajaran magang pada sentra industri kecil rajutan dan bordir yang didukung kurikulum dan pengelolaan pembelajaran menyatu dengan nilai-nilai budaya belajar bekerja dapat meningkatkan kemandirian warga belajar. Secara kuantitatif ada dua pertanyaan umum yang perlu diketahui jawabannya melalui studi empiris (1) berkaitan dengan studi model hipotesis hubungan antar variabel yang berpengaruh terhadap program pembelajaran magang dan kemandirian warga belajar. (2) berkaitan dengan efektivitas model konseptual kurikulum dan pengelolaan pembelajaran magang yang menyatu dengan nilai-nilai budaya belajar bekerja dapat meningkatkan kemandirian warga belajar.

Dengan permasalahan tersebut, penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan sebuah model program pembelajaran magang dalam meningkatkan kemandirian warga belajar pada sentra industri kecil rajutan dan bordir dengan fokus kajian : (1) kurikulum pembelajaran magang, dan (2) pengelolaan pembelajaran magang.

Secara umum penelitian ini menyimpulkan pertama secara alamiah terbukti bahwa nilai-nilai budaya belajar bekerja secara signifikan berpengaruh kuat terhadap kurikulum dan pengelolaan pembelajaran magang. Tingginya pengaruh variable tersebut, ternyata berpengaruh positif pula terhadap tingginya

kontribusi kurikulum dan pengelolaan pembelajaran magang beserta subvariabelnya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap variabel kriterium kemandirian warga belajar. Kedua hasil penelitian eksperimen membuktikan secara empirik model kurikulum dan pengelolaan pembelajaran magang yang dikembangkan studi ini, terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian warga belajar.

Mengacu pada kesimpulan tersebut, model kurikulum dan pengelolaan pembelajaran magang yang dikembangkan studi ini secara fungsional memiliki landasan rasional (*epistemology*) dan memiliki kemanfaatan (*aksiology*) yang tinggi aplikabilitasnya. Sehingga pada kerangka substansial daya dukung dari hasil penelitian faktual, memberikan arah mendasar dalam penyusunan dan pengembangan konseptual model pembelajaran magang, melalui konseptualisasi model kurikulum dan pengelolaan pembelajaran magang pada sentra industri kecil rajutan dan bordir.